

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen “ **Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2018**” ini dapat diselesaikan.

Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun isi dokumen ini meliputi :

- Pendahuluan
- Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan
- Prioritas Belanja Daerah
- Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan
- Rencana Pembiayaan Daerah
- Penutup

Dokumen “ **Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Bima Tahun 2018**” ini disusun sebagai acuan bagi pemerintah Daerah untuk menyusun APBD Kabupaten Bima Tahun 2018.

Dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan dalam penyusunannya. Saran dan kritik membangun sangat diharapkan sebagai bagian dari penyempurnaan tersebut. Terima kasih.

Raba – Bima, Agustus 2017.

BUPATI BIMA,



Hj. Indah Dhamayanti Putri

DAFTAR ISI

<u>KATA PENGANTAR</u>	i
<u>DAFTAR ISI</u>	ii
<u>BAB I. PENDAHULUAN</u>	1
<u>1.1</u> Latar Belakang penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	1
<u>1.2</u> Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	3
<u>1.3</u> Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).....	3
<u>BAB II. RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</u>	
<u>2.1</u> Target Pendapatan Daerah	
<u>2.2</u> Target Penerimaan Pembiayaan Daerah	Error! Bookmark not defined.
<u>BAB III. PRIORITAS BELANJA DAERAH</u>	9
<u>3.1</u> Kebijakan Belanja Daerah	9
<u>3.1.1.</u> Belanja Langsung	10
<u>3.1.2.</u> Belanja Tidak Langsung	10
<u>BAB IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN</u> Error! Bookmark not defined.	
<u>BAB V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH</u>	27
<u>5.1</u> Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah	27
<u>5.2</u> Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	27
<u>BAB VI. PENUTUP</u>	
LAMPIRAN 1	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif. Pemerintahan daerah memiliki sistem perencanaan yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Program-Program Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tersebut, disusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri dalam tiap tahunnya. Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017. Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan salah satu dokumen tahunan daerah yang digunakan sebagai pedoman dan arahan untuk menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum disusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2018 memuat target pencapaian yang terukur program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja

daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan dengan asumsi yang mendasarinya. Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2018 ini akan menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018 dan akhirnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2018.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 adalah untuk menjabarkan kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018 sebagai acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2018 sehingga akan tercipta optimalisasi dan efektivitas alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.

1.3. Dasar Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 adalah :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-u Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/ 795/ SJ tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bima Tahun 2006 – 2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bima;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2021 Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 74 ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 16;
21. Peraturan Bupati Bima Nomor 30 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bima;
22. Peraturan Bupati Bima Nomor 24 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2018.
23. Peraturan Bupati Bima Nomor 22 Tahun 2017 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2021.



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Kondisi Perekonomian

Berlakunya otonomi daerah memberikan dampak yang signifikan bagi Kabupaten Bima. Sejak tahun 2003, wilayah Kabupaten Bima terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Kabupaten Bima dan Kota Bima. Pada tahun 2005 Kabupaten Bima hanya memiliki 153 desa yang terbagi dalam 14 kecamatan, kemudian mengalami pemekaran sehingga meningkat menjadi 18 kecamatan dengan 191 desa di tahun 2012.

Terjadinya pemekaran wilayah di Kabupaten Bima dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat merupakan konsekuensi logis dari dinamika sosial dan perkembangan penduduk yang bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2016 penduduk Kabupaten Bima tercatat 473.890 jiwa dengan kepadatan mencapai 106 jiwa/km² atau dengan kata lain laju pertumbuhan penduduk dalam tahun 2016 sebesar 1,01 persen. Tekanan penduduk tersebut mendorong terciptanya konversi lahan sawah menjadi pemukiman, utamanya untuk pembangunan rumah tempat tinggal dan halaman/ pekarangan. Upaya untuk menghindari cepatnya konversi lahan pertanian ke pemukiman mengharuskan adanya kebijakan pembangunan yang cerdas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil dalam jangka panjang.

Penduduk yang bertambah akan menciptakan peningkatan konsumsi dan kenaikan angkatan kerja. Hal ini akan mendorong tumbuhnya ekonomi wilayah karena pasar semakin bertambah. Untuk merespon itu semua, pemerintah memiliki peran yang strategis untuk memfasilitasi tumbuhnya ekonomi guna menjamin kesejahteraan masyarakatnya.

Secara umum, kondisi perekonomian daerah Kabupaten Bima sangat tergantung dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal yang dinamis. Hal tersebut yang mendasari bahwa penentuan arah kebijakan ekonomi Kabupaten Bima sangat dipengaruhi oleh kondisi internal Kabupaten Bima sendiri seperti perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, kondisi investasi, perdagangan antar wilayah/pulau dan lain sebagainya, serta kondisi eksternal yaitu kondisi perekonomian global, nasional, dan regional tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Rancangan kerangka ekonomi daerah Tahun 2018 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2018. Kerangka ekonomi makro memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten Bima baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting, memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2018. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Bima ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.

A. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)

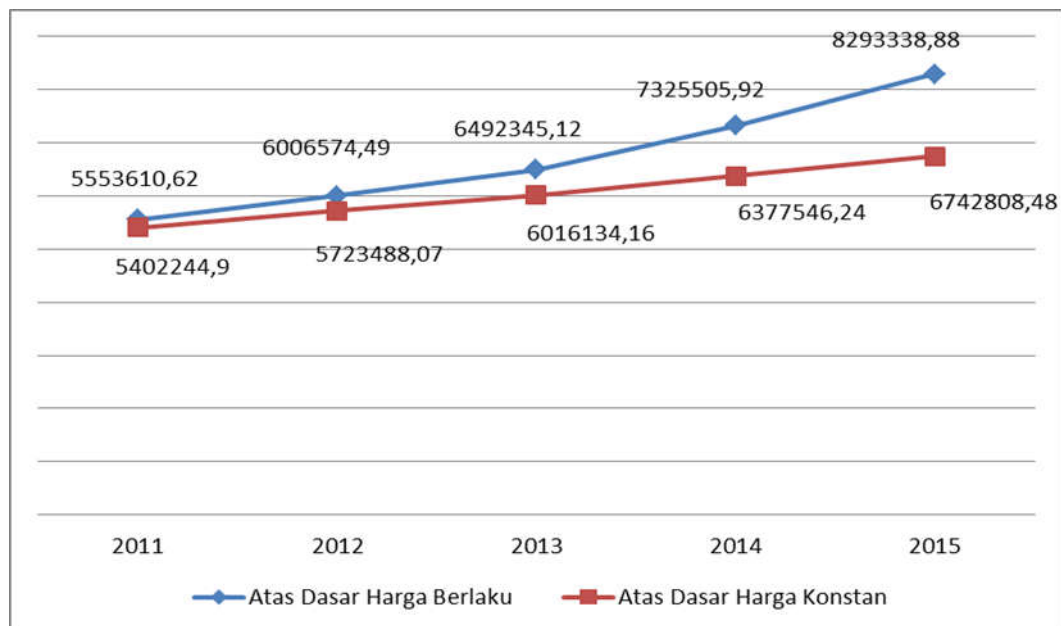
Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah dapat digambarkan dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). karena PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah (*value added*) barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas perekonomian di suatu daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu. Dengan kata lain. PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya

yang dimilikinya guna menciptakan nilai tambah bagi masing-masing sektor perekonomian.

Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu PDRB atas dasar harga berlaku yang digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi dan PDRB atas dasar harga konstan yang dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Dengan demikian, PDRB merupakan indikator untuk mengukur sejauhmana keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, dan dapat digunakan sebagai perencanaan dan pengambil keputusan.

Menurut data BPS Kabupaten Bima, selama kurun waktu tahun 2012-2015, nilai PDRB Kabupaten Bima terus mengalami peningkatan baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Pada tahun 2014, PDRB ADHB Kabupaten Bima mencapai Rp. 7.33 triliun dan pada tahun 2015 mencapai Rp. 8.29 triliun atau diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 12 % dari tahun 2014. Sejalan dengan PDRB ADHB, nilai PDRB Kabupaten Bima Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) juga mengalami peningkatan. Pada Tahun 2012 PDRB ADHK sebesar Rp. 5.72 triliun, kemudian pada tahun 2013 PDRB ADHK meningkat menjadi Rp. 6.02 triliun. Pada tahun 2014, PDRB ADHK menjadi sebesar Rp. 6.38 triliun dan diproyeksikan akan meningkat pada tahun 2015 menjadi Rp. 6.74 triliun.

Gambar 2.1:
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bima (rupiah), 2011-2015



Sumber data : Bima Dalam Angka 2016

Seperti yang terlihat dari tabel di atas, penurunan perekonomian global akibat krisis ekonomi yang terjadi di akhir tahun 2000an berdampak kecil bagi perekonomian Indonesia jika dibandingkan dengan dampak yang dialami negara lain. Tahun 2009 PDB Indonesia turun ke 4.6 persen. Ini berarti Indonesia adalah salah satu negara dengan performa pertumbuhan PDB tertinggi di seluruh dunia pada tahun itu (dan berada di posisi tiga di antara kelompok negara-negara G-20). Meskipun harga-harga komoditas menurun drastis, bursa saham pun nilainya turun, imbal hasil obligasi domestik dan internasional cukup tinggi dan nilai tukar valuta yang melemah, Indonesia masih mampu tumbuh secara signifikan. Keberhasilan ini terutama dikarenakan oleh ekspor Indonesia yang kepentingannya relatif terbatas terhadap perekonomian nasional, kepercayaan pasar yang terus tinggi, dan konsumsi domestik berkelanjutan yang kuat. Konsumsi domestik di Indonesia (khususnya konsumsi swasta) berkontribusi sekitar dua pertiga bagian dari pertumbuhan perekonomian nasional. Dengan sekitar tujuh juta penduduk masuk ke kelas menengah tiap tahunnya, Indonesia sebenarnya menyimpan kekuatan konsumen yang secara signifikan dapat mendorong perekonomian dan memicu peningkatan investasi dalam dan luar negeri dari tahun 2010 dan seterusnya. Lambatnya pertumbuhan ekonomi tahun 2013 (5.78 persen) terjadi karena kombinasi ketidakpastian global yang parah disebabkan oleh perancangan ulang program pembelian aset per bulan Federal Reserve sebesar USD \$85 milyar (pelonggaran kuantitatif) yang mengakibatkan arus keluar modal secara signifikan dari negara-negara berkembang, dan kelemahan isu finansial internal: defisit transaksi berjalan dengan rekor tertinggi, inflasi tinggi (setelah pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi pada bulan Juni 2013) dan nilai tukar rupiah yang terdepresiasi tajam. Untuk menanggulangi masalah-masalah ini dan menjaga stabilitas keuangan negara, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan secara signifikan, walau ini berarti pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dikorbankan.

Perkiraan perkembangan perekonomian Indonesia di masa depan masih cukup positif tetapi telah direvisi oleh organisasi-organisasi internasional dan pemerintah Indonesia karena ketidakpastian global yang berkepanjangan. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

(disingkat MP3EI) yang baru-baru ini dikeluarkan, mencakup tahun 2011 sampai 2025, menunjuk enam sektor sebagai koridor utama perekonomian dengan tujuan menempatkan Indonesia dalam sepuluh besar perekonomian global pada tahun 2025. Rencana ini mengimplikasikan investasi besar pada sektor infrastruktur - sektor yang selama ini menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia - dan tujuan akhirnya adalah PDB akan naik per tahunnya sebanyak delapan sampai sembilan persen. Namun, target tersebut sepertinya terlalu ambisius jika ingin dicapai dalam waktu dekat (2014-2017). Institusi-Institusi otoritas internasional (Bank Dunia, IMF dan Bank Pembangunan Asia) memproyeksikan pertumbuhan PDB tahunan Indonesia dalam kisaran 5.3 sampai 6.0 persen untuk periode 2014 sampai 2017. Organisasi-organisasi ini menekankan bahwa reformasi politik dan ekonomi praktis dikombinasikan dengan investasi besar dalam sektor infrasktruktur akan menambahkan satu atau dua persen dari perkiraan pertumbuhan PDB saat ini.

B. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia per Kapita dan Distribusi Pendapatan

Ada asumsi bahwa peran sektor industri akan menguat terhadap PDB Indonesia sementara sektor pertanian dan jasa akan melemah, karena saat ini sektor manufaktur adalah sektor yang paling populer di Indonesia untuk investasi asing langsung. Selain itu, untuk industri-industri inovatif tertentu pemerintah Indonesia memberikan tax holiday (membebaskan atau mengurangi pajak penghasilan sementara untuk investor asing) dan dalam waktu yang bersamaan akan menyiapkan insentif-insentif guna merangsang industri nasional dengan melarang ekspor bahan baku di tahun 2014 (untuk industri pertambangan). Langkah ini memaksa dunia perindustrian untuk membangun pabrik dan fasilitas pengolahan untuk menghasilkan produk nilai tambah.

Salah satu ciri khas Indonesia yang cukup menonjol adalah bahwa bagian barat negeri ini secara signifikan mendapatkan porsi lebih besar berkaitan dengan kontribusinya terhadap pertumbuhan PDB. Pulau Jawa (terutama Jakarta dan sekitarnya) dan Sumatra berkontribusi lebih dari delapan puluh persen total PDB Indonesia. Alasan utama situasi ini adalah karena bagian barat Indonesia posisinya lebih dekat dengan Singapura dan Malaysia.

Ketiga wilayah ini dilihat secara historis dulunya sama-sama berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi di Asia Tenggara. Sementara itu, bagian timur Indonesia terletak di vakum ekonom dan populasi penduduknya cukup rendah.

PDRB per kapita Kabupaten Bima terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 12.43 juta. dan meningkat pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp. 13.28 juta. Dengan membaiknya kondisi perekonomian Kabupaten Bima. PDRB per kapita Kabupaten Bima atas dasar harga berlakutahun 2013 menjadi Rp. 14.26 juta. sementara itu. PDRB per kapita atas dasar harga berlakupada tahun 2014 mencapai Rp.15.91 Juta.

Tabel 2.1
Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Bima Tahun 2011 s/d 2015

PDRB Per kapita	2011	2012	2013	2014	2015
Atas Dasar Harga Berlaku					
PDRB Per Kapita (Rp.Juta)	12.434.505	13.280.478	14.178.769	15.807.521	17.695.023
Atas Dasar Harga Konstan					
PDRB Per Kapita (Rp.Juta)	12.095.598	12.654.577	13.138.762	13.761.943	14.386.745

Sumber : BPS Kab. Bima

C. Inflasi

Kondisi perekonomian global menjadi salah satu faktor yang memengaruhi laju inflasi di tahun 2017. Harga komoditas energi, terutama minyak mentah dan dinamika pergerakan nilai tukar dolar AS terhadap mata uang dunia, termasuk Rupiah, yang secara keseluruhan diperkirakan masih memberikan kontribusi pada level moderat terhadap pergerakan laju inflasi 2017. Sementara itu dari sisi internal, beberapa faktor yang diperkirakan memberikan tekanan terhadap laju inflasi, antara lain komponen administered price, faktor iklim, dan pengaruh musiman seperti panen, tahun ajaran baru, dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Tekanan pada komponen administered price berasal dari penyesuaian terhadap pergerakan harga komoditas energi, sedangkan faktor iklim berupa fenomena La Nina atau iklim basah akan berpotensi gangguan pada produksi dan pasokan pangan. Namun, dengan perkembangan ekonomi domestik yang baik serta diikuti berlanjutnya peningkatan dukungan infrastruktur akan memberikan dampak positif terhadap

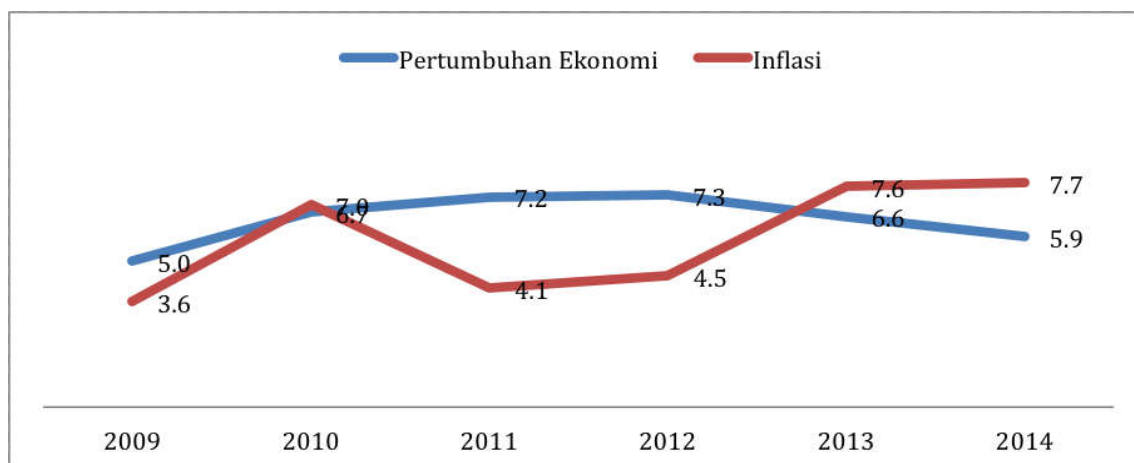
pergerakan laju inflasi di tingkat yang relatif terjaga. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah dalam menjaga tingkat inflasi berupa kebijakan memitigasi adanya gejolak harga pangan dan energi domestik yang dilaksanakan melalui strategi pengendalian baik dari sisi produksi, distribusi, maupun konsumsi. Selain itu, Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran guna stabilisasi harga pangan serta dana cadangan beras pemerintah yang dapat dimanfaatkan pada saat terjadi kelangkaan barang dan gejolak harga melalui program-program, seperti operasi pasar dan penyediaan bahan pangan pokok dengan harga terjangkau. Dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan, Pemerintah senantiasa melakukan evaluasi serta melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia untuk menciptakan bauran kebijakan fiskal, moneter, dan pengembangan sektor riil yang tepat dengan mempertimbangkan dampak inflasi kepada perekonomian secara menyeluruh. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan inflasi serta kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil, laju inflasi tahun 2017 diperkirakan mencapai 4,0 persen atau berada pada kisaran rentang sasaran inflasi yang telah ditetapkan sebesar $4,0 \pm 1,0$ persen.

Tabel 2.2
Laju Inflasi Tahun 2015 s/d 2017

Bulan Tahun	Tingkat Inflasi
April 2017	4.17 %
Maret 2017	3.61 %
Februari 2017	3.83 %
Januari 2017	3.49 %
Desember 2016	3.02 %
Nopember 2016	3.58 %
Oktober 2016	3.31 %
September 2016	3.07 %
Agustus 2016	2.79 %
Juli 2016	3.21 %
Juni 2016	3.45 %
Mei 2016	3.33 %
April 2016	3.60 %

Bulan Tahun	Tingkat Inflasi
Maret 2016	4.45 %
Februari 2016	4.42 %
Januari 2016	4.14 %
Desember 2015	3.35 %
Nopember 2015	4.89 %
Oktober 2015	6.25 %
September 2015	6.83 %

Gambar 2.2. Tingkat Inflasi Indonesia (2009-2014)



Sumber: Kajian Kebijakan, Prospek Perekonomian Indonesia Tahun 2015

Perkembangan laju inflasi tahunan di Bima dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.3

Nilai inflasi rata-rata Tahun 2011 s.d 2015

Inflasi	2012	2013	2014	2015
%	3.61	10.42	7.37	4.11

Berdasarkan tabel 2.3 dapat diketahui adanya fluktuasi laju inflasi di Bima dari tahun ke tahun. Laju inflasi pada tahun 2011 sebesar 6.35% dan meningkat menjadi 7.19% pada tahun 2012. dan naik pada level 10.42% pada tahun 2013 seiring dengan adanya kebijakan dari pemerintah pusat yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Namun pada tahun 2014

mengalami penurunan yakni dengan nilai inflasi sebesar 7.37% dan mencapai 4.11% pada tahun 2015.

Pada bulan April 2017 NTB mengalami Inflasi 0,03 persen, atau kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 126,55 pada bulan Maret 2017 menjadi 126,59 pada bulan April 2017. Angka ini dibawah Inflasi nasional yg tercatat sebesar 0,09 persen.

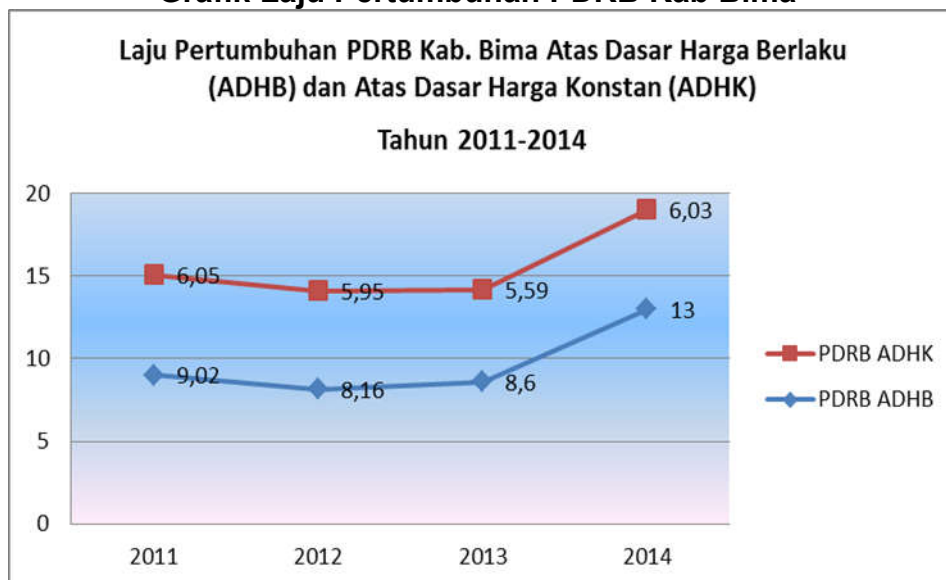
Kota Mataram mengalami deflasi 0,06 persen dan kota Bima mengalamj inflasi sebesar 0,39 persen.

Laju inflasi NTB tahun kalender April 2017 sebesar 1,07 persen lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun kalender April 2016 sebesar 0,63 persen. Sedangkan laju inflasi tahun ke tahun April 2017 sebesar 3,05 persen lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi tahun ke tahun bulan April 2016 sebesar 3,83 persen.

D. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Sejalan dengan arah kebijakan ekonomi nasional, regional, dan menengah pada RPJMD 2016 – 2021, maka Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bima Tahun 2017 tercatat sebesar 5,90% atau mengalami peningkatan dibanding tahun 2011 yang tercatat sebesar 5,63%. Pertumbuhan PDRB pada Tahun 2013 akan meningkat mencapai 6,00% dan pada tahun 2014 diperkirakan akan mencapai lebih dari 6%.

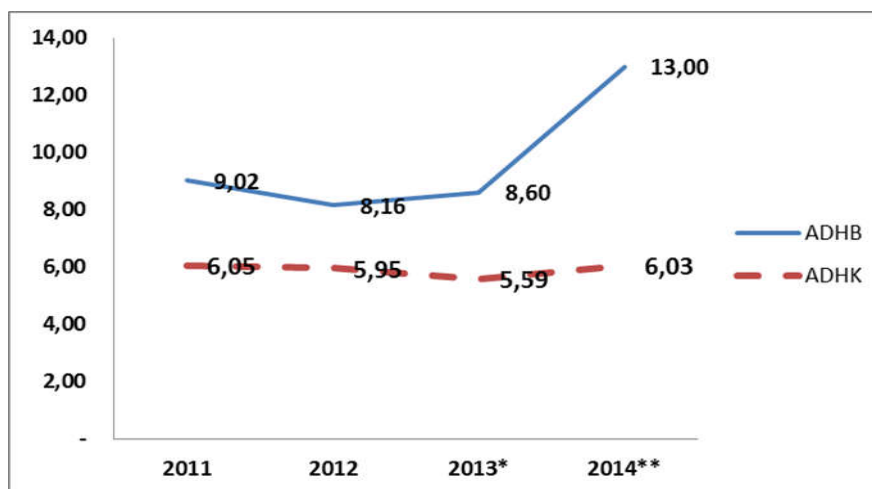
Gambar 2.3
Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Kab Bima



Sumber : Data PDRB Kabupaten Bima Tahun 2014 dan hasil olahan

Gambar 2.4

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bima Tahun 2011-2014



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2012-2015

PDRB Kabupaten Bima atas harga konstan dari tahun 2013 hingga tahun 2016 terus mengalami peningkatan. Tahun 2013 PDRB Kabupaten Bima atas harga konstan sebesar Rp. 6.016 triliun dan di tahun 2014 menjadi atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp. 6.377. triliun dan Tahun 2016 PDRB Kabupaten Bima atas harga konstan meningkat menjadi Rp.7.095 triliun.

Tabel 2.4
Perkembangan PDRB Kabupaten Bima Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2013-2016* (Rp. Juta)

Kategori	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.810.250	2.953.306	3.145.730	3.220.117
2. Pertambangan dan Pengalihan	183.554	197.603	213.146	230.198
3. Industri Pengolahan	146.663	152.972	159.478	169.602
4. Pengadaan Listrik dan Gas	3.226	4.504	4.263	4.999
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.047	3.050	3.144	3.273
6. Konstruksi	374.944	402.508	432.761	466.127
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	893.621	957.634	1.012.520	1.087.483
8. Transportasi dan Pergudangan	452.520	484.986	512.110	544.625
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	15.729	16.748	17.883	19.624
10. Informasi dan Komunikasi	83.631	90.657	98.455	107.020
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	164.531	176.603	190.554	210.780

12. Real Estate	151.454	160.791	171.509	182.073
13. Jasa Perusahaan	5.272	5.649	5.969	6.364
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	384.698	403.682	417.910	429.152
15. Jasa Pendidikan	203.404	217.305	232.629	245.144
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	62.625	66.708	71.230	75.283
17. Jasa lainnya	76.966	83.096	88.226	93.722
PDRB dengan Tambang	6.016.134	6.377.801	6.777.516	7.095.587
PDRB tanpa Tambang	6.016.134	6.377.801	6.777.516	7.095.587

Tabel 2.5
Rata-Rata Pertumbuhan PDRB Sektoral Tahun 2011-2014*
(ADHK dan ADHB)

Lapangan Usaha/Industry		ADHB (%)	ADHK (%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry and Fishing	7,21	4,83
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	13,14	7,42
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	4,46	4,11
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	11,65	18,29
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	6,38	-0,02
F	Konstruksi/Construction	8,10	6,32
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	13,87	9,05
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	13,29	6,15
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	15,90	7,19
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	9,43	8,74
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	13,53	7,65
L	Real Estat/Real Estate Activities	15,80	8,85
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	11,68	6,77
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	11,44	3,62
P	Jasa Pendidikan/Education	10,65	5,80
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	8,29	6,02
R,S,T,U	Jasa lainnya/Other Services Activities	8,56	6,65
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic		9,70	5,90

Product		
----------------	--	--

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima, 2015

PDRB Adh berlaku Provinsi NTB pada triwulan I-2017 mencapai hampir 28 trilyun rupiah, sedikit lebih tinggi dari keadaan triwulan I-2016.

Pertumbuhan ekonomi NTB di triwulan I-2017 dengan tambang mengalami kontraksi sebesar -4,18 persen sedangkan tanpa tambang tumbuh sebesar 4,59 persen.

Pola pergerakan harga pada triwulan I-2017 mirip dengan triwulan I-2016 yang ditandai oleh inflasi yang berada pada kisaran sama (1,04 persen kondisi Triwulan I-2017 dan sebesar 1,05 persen kondisi Triwulan I-2016).

BI 7 days repo rate masih berada pada level 4,75 persen, kondisi ini terjadi sejak Oktober 2016.

Penumpang angkutan laut pada triwulan I - 2017 lebih rendah dibanding pada Triwulan I - 2016 namun sebaliknya, penumpang angkutan udara justru mengalami peningkatan pada triwulan I - 2017 dibandingkan dengan Triwulan I - 2016

Rata-rata TPK Hotel Bintang menurun di triwulan I-2017 (dari 44,66 pada triwulan IV 2016 menjadi 41,98 pada triwulan I 2017), demikian juga halnya dengan Rata-rata TPK Hotel Non Bintang di triwulan yang sama (dari 25,84 pada triwulan IV 2016 menjadi 22,08 pada triwulan I 2017)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di NTB pada Februari 2017 mencapai 3,86 persen, angka ini lebih rendah dibandingkan keadaan Agustus 2016 dimana TPT mencapai 3,94 persen.

PDRB Kabupaten Bima atas harga konstan dari tahun 2013 hingga tahun 2016 terus mengalami peningkatan. Tahun 2013 PDRB Kabupaten Bima atas harga konstan sebesar Rp. 6.016.134 triliun dan di tahun 2015 menjadi atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp. 6.777 triliun dan Tahun 2016 PDRB Kabupaten Bima atas harga konstan meningkat menjadi Rp. 7.095 triliun.

Tabel 2.6

**Perkembangan PDRB Kabupaten Bima Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Tahun 2013-2016* (Rp. Juta)**

Kategori	2013	2014	2015	2016
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.810.250	2.953.306	3.145.730
2. Pertambangan dan Penggalian	183.554	197.603	213.146	230.198
3. Industri Pengolahan	146.663	152.972	159.478	169.602
4. Pengadaan Listrik dan Gas	3.226	4.504	4.263	4.999
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.047	3.050	3.144	3.273
6. Konstruksi	374.944	402.508	432.761	466.127
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	893.621	957.634	1.012.520	1.087.483
8. Transportasi dan Pergudangan	452.520	484.986	512.110	544.625
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	15.729	16.748	17.883	19.624
10. Informasi dan Komunikasi	83.631	90.657	98.455	107.020
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	164.531	176.603	190.554	210.780
12. Real Estate	151.454	160.791	171.509	182.073
13. Jasa Perusahaan	5.272	5.649	5.969	6.364
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	384.698	403.682	417.910	429.152
15. Jasa Pendidikan	203.404	217.305	232.629	245.144
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	62.625	66.708	71.230	75.283
17. Jasa lainnya	76.966	83.096	88.226	93.722
PDRB dengan Tambang	6.016.134	6.377.801	6.777.516	7.095.587
PDRB tanpa Tambang	6.016.134	6.377.801	6.777.516	7.095.587

Sumber : BPS Kabupaten Bima, 2016

PDRB Kabupaten Bima Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 sebesar Rp. 7 325 triliun atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp. 6 492 triliun dan meningkat menjadi Rp. 8 293 triliun tahun 2015 dan diperkirakan akan mengalami kenaikan menjadi Rp. 9 171 triliun di tahun 2016.

**Tabel 2.7
Perkembangan PDRB Kabupaten Bima Atas Dasar Harga Berlaku
(ADHB) Tahun 2013-2016* (Rp. Juta)**

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan	2 906 045.63	3 191 829.75	3 604 707.52	4 038 614.14
Pertambangan Dan Penggalian	190 244.97	213 209.69	240 605.95	265 539.41
Industri Pengolahan	149 009.08	155 776.21	169 439.42	186 724.68
Pengadaan Listrik Dan Gas	2 519.54	3 163.22	3 297.24	4 938.05
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	3 657.97	3 941.87	4 115.84	4 622.64

Dan Daur Ulang				
Konstruksi	380 434.10	429 497.89	492 533.78	537 887.26
Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor	992 958.71	1 143 710.20	1 283 071.05	1 419 739.90
Transportasi Dan Pergudangan	539 149.77	642 781.75	762 679.94	840 082.74
Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	19 236.10	22 797.02	25 764.00	29 517.13
Informasi Dan Komunikasi	83 658.43	92 980.85	100 235.19	110 456.95
Jasa Keuangan Dan Asuransi	192 945.28	216 295.09	241 947.26	276 541.71
Real Estate	178 258.38	206 278.16	230 154.01	252 247.83
Jasa Perusahaan	5 753.36	6 717.20	7 421.69	8 201.83
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	467 695.74	576 339.19	653 391.38	675 076.35
Jasa Pendidikan	235 451.94	258 370.50	292 031.58	322 914.60
Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	65 277.03	72 634.86	81 034.98	87 949.75
Jasa Lainnya	80 049.08	89 182.50	100 908.07	110 335.44
Produk Domestik Regional Bruto	6 492 345.12	7 325 505.92	8 293 338.88	9 171 390.42

Sumber : BPS Kabupaten Bima, 2012

2.2. Prospek Ekonomi Daerah

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2018 sebesar 5,4-6,1 persen, pertumbuhan ekonomi di NTB di tahun 2018 diharapkan tumbuh sebesar 6,15-6,80 persen.

Pertumbuhan ekonomi NTB didukung oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor perdagangan besar dan eceran, dengan kontribusi total sebesar 53,97 persen. “Maka pemerintah daerah perlu menjaga pertumbuhan ketiga sektor tersebut agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi NTB,” imbuhnya. Selain pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan NTB di tahun 2018 diharapkan mencapai 15,34 persen dengan tingkat pengangguran sebesar 3,40 persen.

Di tahun 2016, tingkat kemiskinan di NTB sebesar 16,02 persen. Dan di tahun 2017, angka kemiskinan diproyeksi dapat turun menjadi 15,85 persen. Selanjutnya, terkait beberapa proyek prioritas yang akan terealisasi di NTB dalam jangka waktu mendatang, diantaranya pengembangan KEK Mandalika, Global Hub, dan sebagainya.

Apresiasi yang tinggi untuk Gubernur NTB, khususnya terkait penyiapan lahan di KEK Mandalika. “Karena kemajuan di Mandalikan ini signifikan, padahal untuk menata kawasan itu saja butuh waktu 3 dekade. Tapi Gubernur NTB butuh 4 bulan saja,” ujarnya. “Maka pertumbuhan ekonomi di NTB di tahun 2018 diharapkan dapat tumbuh sebesar 6,15-6,80 persen. Melihat optimisme semua di sini kita yakin ini bisa tercapai, apalagi kalau KEK Mandalika nanti sudah beroperasi. Dalam rencana pengembangan KEK

Mandalika tidak hanya terfokus pada pengembangan infrastruktur pariwisata namun juga kesiapan SDM pariwisata. “Kami sudah melihat SMK dan politeknik pariwisata yang nantinya mendukung kegiatan pariwisata di NTB ini sekarang sedang dilakukan.

Kondisi Ekonomi Kabupaten Bima sendiri diperkirakan masih akan mengalami pertumbuhan positif sampai pada tahun 2018 didorong pertumbuhan konsumsi baik konsumsi rumah tangga maupun konsumsi pemerintah dan investasi swasta. Peningkatan belanja pemerintah sangat dipengaruhi oleh program pembangunan infrastruktur dasar dan program-program yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Hal yang terus menambah pertumbuhan adalah produksi dan investasi dengan terbangunnya sarana prasarana infrastruktur, dibarengi dengan kebijakan ekonomi nasional dalam mempertahankan laju inflasi dibawah 2 digit dan mempertahankan stabilitas kurs rupiah, dan Kenaikan Tarif Dasar Listrik akibat penghapusan subsidi BBM.

Kebijakan ekonomi makro diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi terutama dalam mengatasi permasalahan dan tantangan mendasar terkait pengangguran dan penanggulangan kemiskinan.

Selain itu juga harus mampu mendukung kegiatan yang menjadi Prioritas Pembangunan, untuk itu dalam Kebijakan Umum APBD ini harus memperhatikan Prioritas Pembangunan Daerah yang merupakan tahun Ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021. Adapun Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bima tahun 2018 berikut :

1. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama, Mendukung Supremasi Hukum serta mewujudkan Keamanan dan Ketertiban;
2. Percepatan Pembangunan Kantor Pemerintahan Kabupaten Bima di Wilayah Woha;
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan;
4. Peningkatan Kualitas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan KB;
5. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Perluasan Lapangan Kerja, melalui Pengembangan Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penyediaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

6. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Komoditas Pertanian, Perikanan dan Kelautan
7. Pembangunan Infrastruktur Transportasi, Air Minum dan Sanitasi serta Energi
8. Penanggulangan Bencana, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang Penataan sistem ketahanan pangan daerah;
9. Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh;
10. Tata Kelola Pemerintahan dengan Prinsip Good Governance.



BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1. Asumsi Dasar Penyusunan RAPBD

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah dokumen yang memuat kebijakan terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode yang terkait dengan APBD. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan pendapatan asli daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional berdasarkan potensi.
2. Perkiraan penerimaan dari dana perimbangan mengalami peningkatan disesuaikan dengan penetapan dan informasi dari pemerintah atasan.
3. Alokasi belanja daerah juga diperkirakan naik dengan adanya beberapa kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh daerah.
4. Pemerintah Kabupaten Bima masih menghadapi masalah pokok untuk mengurangi angka pengangguran terbuka dari 4,72% tahun 2014 menjadi sebesar 3,70% pada tahun 2015.
5. Pemerintah Kabupaten Bima dihadapkan pada upaya untuk menurunkan angka kemiskinan dari 15,78% tahun 2015 menjadi 14,01% tahun 2016.
6. Kebijakan anggaran daerah tahun 2018 ditekankan pada upaya-upaya pencapaian target yang telah ditetapkan pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2016-2021 dengan fokus antara lain pada peningkatan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, pengurangan angka kemiskinan, upaya pengurangan angka pengangguran, kemudahan akses modal usaha.

3.2. Laju Inflasi

Pada bulan Juni 2017, Nusa Tenggara Barat mengalami inflasi sebesar 0,58 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 127,25 pada bulan Mei 2017 menjadi 127,99 pada bulan Juni 2017. Angka inflasi ini berada di bawah angka inflasi nasional yang tercatat sebesar 0,69 persen.

Untuk wilayah Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram mengalami inflasi sebesar 0,47 persen dan Kota Bima mengalami inflasi sebesar 0,98 persen. Inflasi Nusa Tenggara Barat bulan Juni 2017 sebesar 0,58 persen terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan dengan kenaikan indeks pada Kelompok Sandang sebesar 1,32 persen; Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau sebesar 1,07 persen; Kelompok Transport, Komunikasi & Jasa Keuangan sebesar 0,78 persen; Kelompok Bahan Makanan sebesar 0,58 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 0,37 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan bakar sebesar 0,13 persen; Kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olah raga sebesar 0,07 persen. Komoditas terbesar penyumbang inflasi adalah Bawang Merah, Angkutan Udara, Nasi Dengan Lauk, Tongkol/Ambu-Ambu, Tarip Listrik, Bandeng/Bolu, Kue Kering Berminyak, Tenggiri, Selar/Tude dan Daging Sapi. Komoditas terbesar yang memberikan sumbangan terjadinya deflasi adalah Bawang Putih, Cabai Rawit, Daging Ayam Ras, Tomat Sayur, Batu Bata/Batu Tela, Cabai Merah, Beras, Apel, Wortel dan Telepon Seluler.

Laju inflasi di Kabupaten Bima dari tahun ke tahun dapat ditekan dari 10,42% pada tahun 2013 dan menurun menjadi 7,37% pada tahun 2014, malah semakin menurun pada level 4,11% pada tahun 2015 seiring dengan adanya kebijakan dari pemerintah pusat yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Komponen yang berpengaruh terhadap pembentukan inflasi di Kabupaten Bima adalah kenaikan harga pangan terutama sembilan bahan pokok, seperti : bahan makanan, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar, kelompok sandang, kelompok kesehatan, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga, sedangkan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi. Oleh karenanya, upaya pengendalian harga dengan pengawasan distribusi barang dan peningkatan produksi akan mampu mengatasi lonjakan inflasi.

3.3. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bima tahun 2017 dan 2018 diprediksi akan mengalami kenaikan yang signifikan, laju pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dicapai melalui kebijakan pengembangan ekonomi daerah yang terfokus pada sektor riil terutama pada sektor pertanian, perdagangan dan pariwisata (usaha mikro, kecil dan menengah).

Pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bima mengalami peningkatan sebesar 5,63% dan mengalami pertumbuhan menjadi 5,90% pada Tahun 2012. Dengan membaiknya kondisi perekonomian Kabupaten Bima, maka diperkirakan pada tahun 2013 perekonomian Kabupaten Bima mengalami pertumbuhan positif menjadi 5,67%, namun tahun 2014 diperkirakan akan meningkat menjadi 5,98% sehingga pada akhir tahun Rencana Pembangunan Jangka menengah yaitu 2015 direncanakan naik menjadi 6,11%.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1. Pendapatan Daerah

Tujuan otonomi daerah adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Memudahkan masyarakat dalam memantau dan mengontrol penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah serta mendorong timbulnya kreatifitas dan inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan dapat menggali sumber-sumber keuangan (pendapatan), khusus untuk memenuhi pendanaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kebijakan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah tersebut diupayakan melalui pos-pos anggaran sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan pada daerah dalam rangka mendukung kebijakan otonomi daerah, daerah dituntut untuk lebih kreatif dalam meningkatkan PAD guna meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD. Sumber-sumber PAD harus digali secara maksimal untuk dapat meningkatkan PAD termasuk didalamnya adalah pajak dan retribusi daerah, namun dalam mengejar target pendapatan daerah harus berada dalam koridor peraturan perundang-undang yang berlaku. Sumber-sumber PAD yang utama adalah Pajak dan Retribusi Daerah. Untuk tahun ini Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah merupakan bagian dari PAD.

Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah ini, pemerintah daerah berupaya untuk tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak daerah dan pembayar retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan serta peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui bimtek pada aparat kecamatan dan desa.

Upaya pencapaian target Pendapatan Asli Daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap masing - masing jenis penerimaan, obyek penerimaan serta rincian obyek penerimaan.

2. Dana Perimbangan

Untuk mengurangi ketimpangan antara pusat dan daerah diberlakukan sistem bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak antara pemerintah pusat dan daerah. Bagi hasil penerimaan Negara tersebut meliputi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan bagi hasil sumber daya alam yang terdiri dari sektor kehutanan, pertambangan umum, minyak dan gas alam serta perikanan. Bagi hasil tersebut diberikan kepada daerah dengan prosentase tertentu yang diatur dalam undang-undang

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Dana Hibah, Dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya, bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya, dana alokasi desa dari pemerintah dan dana Insentif daerah yang diperoleh dari predikat WTP.

Target Pendapatan Daerah tahun 2018 diproyeksikan meningkat sebesar **Rp. 470.212.977.078,-** atau % dari **Rp. 1.639.840.143.342,50** pada tahun 2017 menjadi **Rp. 2.110.053.120.420,50** tahun 2018 yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada tahun 2018 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bima diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 5,00% yaitu dari **Rp. 120.447.644.671,00** di tahun 2017 diperkirakan meningkat menjadi **Rp. 126.470.026.904,55** pada tahun 2018. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

- Pajak daerah	Rp. 11.564.492.251,20
- Retribusi daerah	Rp. 23.186.198.175.,00
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp. 4.800.600.000,00
- Lain-lain PAD yang sah	Rp. 86.918.736.478,35

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan Kabupaten Bima diperkirakan akan naik sebesar 22,18% dari tahun 2017 sebesar **Rp. 1.308.607.256.000,00** menjadi **Rp. 1.616.707.436.352,35**. Dana Perimbangan ini terdiri dari :

- Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Rp. 70.299.581.100,00
- Dana Alokasi Umum Rp. 957.690.948.900,00
- Dana Alokasi Khusus Rp. 588.716.906.352,35

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun diperkirakan naik, dari **Rp. 210.785.242.671,50** ditahun 2017 meningkat sebesar **Rp. 156.090.414.492,10** atau **74,05%** menjadi **Rp. 366.875.657.163,60** tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut :

- Hibah Rp. 1.537.282.039,50
- Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan pemerintah daerah lainnya Rp. 44.022.099.124,10
- Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Rp. 3.300.000.000,00
- Dana Alokasi Desa dari Pemerintah Rp. 310.516.276.000,00
- Dana Insentif Daerah Rp. 7.500.000.000,00

Berdasarkan uraian di atas, maka proyeksi pendapatan Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2018, adalah sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Bima Tahun 2018

Nomor Urut	URAIAN	APBD 2017	PPAS 2018	SELISIH Antara APBD 2017 - PPAS 2018	%
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN DAERAH				

Nomor Urut	URAIAN	APBD 2017	PPAS 2018	SELISIH Antara APBD 2017 - PPAS 2018	%
1	2	3	4	5	6
1.1	Pendapatan Asli Daerah	120.44.644.61,00	126.470.026.904,55	6.022.382.233,55	5,00
1.1.1	Pajak Daerah	11.013.802.144,00	11.546.492.251,20	550.690.107,20	5,00
1.1.2	Retribusi Daerah	22.082.093.500,00	23.186.198.175,00	1.104.104.675,00	5,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.572.000.000,00	4.800.600.000,00	228.600.000,00	5,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	82.779.749.02,00	86.918.36.478,35	4.138.98.451,35	5,00
1.2	Dana Perimbangan	1.308.607.256.000,00	1.616.707.436.352,35	308.100.180.352,35	23,54
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	66.951.982.000,00	70.299.581.100,00	3.347.599.100,00	5,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	895,038,270,000	957.690.948.900,00	62.652.678.900,00	7,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	346.617.004.000,00	588.716.906.352,35	242.099.902.352,35	69,85
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	210.785.242.671,50	366.875.657.163,60	156.090.414.952,10	74,05
1.3.1	Hibah	2.306.620.085,00	1.537.282.039,50	-769.338.045,50	(33,35)
1.3.2	Dana Darurat	0,00		0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	42,720,484,586,50	44.022.099.124,10	1.301.614.537,60	3,05
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00		0,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3.000.000.000,00	3.300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
1.3.9	Dana Transfer Tunjangan Guru	0	0	0	0
1.3.10	Dana Alokasi Desa Dari Pemerintah	155.258.138.000,00	310.516.276.000,00	155.258.138.000,00	100,00
1.3.15	Dana Insentif Daerah	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0	00,00
	Jumlah Pendapatan	1.639.840.143.342,50	2.110.053.120.420,50	470.212.977.078,00	28,67

4.2. Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip –prinsip penganggaran, belanja daerah tahun anggaran 2018 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah tahun 2018 akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan

urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Kebijakan perencanaan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran 2018 sebagai berikut :

1. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
2. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
3. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan anggaran untuk sektor unggulan dan menggalakan investasi di daerah.
4. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus *SMART* (*Spesifict, Measurable, Acceptable, Reliable, Time*) yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut:
 - a. Penerimaan dana bagi hasil pajak diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman di perkotaan dan di perdesaan, pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan;
 - b. Penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam diutamakan pengalokasiannya untuk mendanai pelestarian lingkungan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum, sosial, pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang - undangan;

- c. Dana alokasi umum ditujukan untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai negeri sipil daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum;
 - d. Dana alokasi khusus (DAK) dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan pendidikan, kesehatan dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang - undangan;
 - e. Pemerintah daerah menyediakan dana pendamping/*cost sharing* pada program/kegiatan yang berasal dari pusat maupun Provinsi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
6. Belanja Pegawai.
- a. Besarnya penyediaan gaji pokok/tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) mempedomani ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Penganggaran gaji dan tunjangan ke-tiga belas dan gaji Ke-empat belas PNSD dan tunjangan jabatan struktural/fungsional dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD), pemerintah daerah menganggarkan dalam APBD sesuai dengan rencana jumlah CPNSD;
 - d. Dalam merencanakan belanja pegawai diperhitungkan penyesuaian gaji PNS sebesar 6% dan "accres" gaji paling tinggi 2,5% yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan penambahan jumlah pegawai akibat adanya mutasi dan adanya penambahan jumlah pegawai;
 - e. Pemberian honorarium bagi PNSD dilakukan dengan mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta pemerataan penghasilan, yang besarnya ditetapkan dalam keputusan kepala daerah.
7. Belanja Hibah
- a. Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah

lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus. Uang dan barang yang diberikan dalam bentuk hibah harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.

- b. Hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dapat diberikan dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah dan layanan dasar umum sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Hibah dapat diberikan kepada perusahaan daerah dalam rangka menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan sepanjang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
- d. Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan tetapi dibutuhkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan/atau kelompok masyarakat/perorangan.
- e. Untuk optimalisasi fungsi APBD sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, pengalokasian bantuan hibah ditujukan untuk mendukung pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

8. Belanja Bantuan Sosial

- a. Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberian bantuan sosial dilakukan secara selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.
- b. Untuk optimalisasi fungsi APBD sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 23a ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

39 Tahun 2012, Pemberian bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

9. Belanja Bantuan Keuangan

- a. Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan bagi daerah dan/atau desa penerima bantuan.
- b. Dalam rangka menghindari duplikasi penganggaran dalam APBD kabupaten, urusan pemerintahan daerah yang bukan merupakan kewenangan kabupaten tidak dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD Kabupaten, namun dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus. Bantuan keuangan tersebut disalurkan langsung ke rekening lembaga penerima bantuan.
- c. Untuk penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

10. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi khusus dalam pemberian pelayanan umum.

Kebijakan belanja daerah terlebih dahulu memprioritaskan pos belanja yang wajib dikeluarkan. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dan juga Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 belanja daerah dikelompokkan dalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Bima Tahun 2018 diasumsikan mengalami peningkatan sebesar **Rp. 444.658.221.872,55** atau **26,76%** menjadi **Rp. 2.106.593.120.420,50** pada tahun 2018 dari **Rp. 1.661.934.898.547,95** tahun sebelumnya, meliputi :

1. Belanja Tidak Langsung mencakup belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintahan desa, dan belanja tidak terduga. Belanja tidak langsung Kabupaten Bima tahun 2018 di perkirakan naik sebesar **Rp. 220.937.103.446,60** atau 21,41% dari **Rp. 1.032.043.601.963,95** tahun 2017 menjadi sebesar **Rp. 1.252.980.705.410,55** tahun 2018. Belanja pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Belanja Tidak Terduga mengalami peningkatan sedangkan Belanja bantuan sosial tidak mengalami perubahan.
2. Belanja Langsung Kabupaten Bima tahun 2018 diasumsikan mengalami peningkatan sebesar 35,52% dari **Rp. 629.891.296.584,00** pada tahun 2017 menjadi **Rp. 853.612.415.009,88** pada tahun 2018.

Tabel 4.2
Proyeksi Belanja Kabupaten Bima Tahun 2018

Nomor Urut	URAIAN	APBD 2017	PPAS 2018	SELISIH Antara APBD 2017 - PPAS 2018	%
1	2	3	4	5	6
2.	BELANJA DAERAH				
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.032.043.601.963,95	1.252.980.705.410,55	220.937.103.446,60	21,41
2.1.1	Belanja Pegawai	750.965.087.699,55	804.557.633.447,93	53.592.545.748,38	7,14
2.1.2	Belanja Bunga	0.00	0.00	-	0.00
2.1.3	Belanja Subsidi	0.00	0.00	-	0.00
2.1.4	Belanja Hibah	21.033.664.000,00	21.664.673.920,00	2.103.366.400,00	10,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.468.000.000,00	1.468.000.000,00	0	0.00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	3.309.677.064,00	3.475.069.042,62	165.391.978,22	,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prpinsi/ Kabupaten/ Kota Dan Pemerintah Desa	252.267.173.200,00	416.815.329.000,00	164.548.155.800,00	64,52
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000	3.000.000.000,00	0.00	0.00
2.2	Belanja Langsung	629.891.296.584,00	853.612.415.009,88	223.721.118.425,88	35,52
2.2.1	Belanja Pegawai	91.802.811.500,00			0.00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	268.802.530.290,00			0.00
2.2.3	Belanja Modal	269.285.954.794,00			0.00
	Jumlah Belanja	1.661.934.898.547,95	2.106.593.120.420,50	444.658.221.872,55	26,76
	Surplus/ Defisit	-22.094.755.205,45	3.460.000.000,00	25.554.755.205,45	(115,66)

4.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

- 1) Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman. Penerimaan pembiayaan daerah tahun 2018 diasumsikan

turun sebesar 49,18% dari **Rp 29.994.755.205,45** di tahun 2017 turun menjadi **Rp 4.440.000.000,00**. Penurunan yang signifikan terjadi pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA)

- 2) Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah/BUMD, dana bergulir koperasi dan pembayaran pokok utang askes. Pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2018 direncanakan tidak mengalami perubahan dari tahun 2017 yaitu sebesar **Rp. 7.900.000.000,00**.

Tabel 4.3
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bima Tahun 2018

Nomor Urut	URAIAN	APBD 2017	PPAS 2018	SELISIH Antara APBD 2017 - PPAS 2018	%
1	2	3	4	5	6
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	Penerimaan Pembiayaan				
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	29.054.755.205,45	3.500.000.000,00	-25.554.755.205,45	(87,95)
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	940.000.000,00	940.000.000,00	0.00	0.00
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	29.994.775.205,45	4.440.000.000,00	-25.554.755.205,45	(49,18)
6.2	Pengeluaran Pembiayaan				
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6.900.000.000	6.900.000.000,00	0.00	0.00
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	1.000.000.000	1.000.000.000,00	0	0.00
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.5	Dana Bergulir	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	7.900.000.000	7.900.000.000,00	0.00	0.00
	Pembiayaan Netto	22.094.755.205,45	-3.460.000.000,00	-25.554.755.205,45	(115,66)
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA-TB)	0.00	0.00	(0.00)	0%



BAB V **PENUTUP**

Kebijakan Umum APBD (KUA) memuat arah kebijakan baik di bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai kewenangan, urusan dan fungsi pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Kebijakan tersebut disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya.

Demikian kebijakan umum APBD ini disusun selanjutnya dibahas dan disepakati untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2018.

Bima, Agustus 2017

BUPATI BIMA,

Hj. Indah Dhamayanti Putri

Lampiran 1

**PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN DAERAH
KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2018**

Nomor Urut	Uraian	APBD 2017	Proyeksi KUA PPAS 2018	SELISIH Antara APBD 2017 - KUA PPAS 2018	%
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	Pendapatan Asli Daerah	120,447,644,671.00	126,470,026,904.55	6,022,382,233.55	5.00
1.1.1	Pajak Daerah	11,013,802,144.00	11,564,492,251.20	550,690,107.20	5.00
1.1.2	Retribusi Daerah	22,082,093,500.00	23,186,198,175.00	1,104,104,675.00	5.00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4,572,000,000.00	4,800,600,000.00	228,600,000.00	5.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	82,779,749,027.00	86,918,736,478.35	4,138,987,451.35	5.00
1.2	Dana Perimbangan	1,308,607,256,000.00	1,598,806,670,952.35	290,199,414,952.35	22.18
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	66,951,982,000.00	70,299,581,100.00	3,347,599,100.00	5.00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	895,038,270,000.00	957.690.948.900,00	62.652.678.900,00	7.00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	346,617,004,000.00	588,716,906,352.35	242,099,902,352.35	69.85
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	210,785,242,671.50	366.875.657.163,60	156.090.414.492,10	74,05
1.3.1	Hibah	2,306,620,085.00	1,537,282,039.50	-769,338,045.50	(33.35)
1.3.2	Dana Darurat	0	0.00	0	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	42,720,484,586.50	44,022,099,124.10	1,301,614,537.60	3.05
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	0.00	0	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3,000,000,000.00	3,300,000,000.00	3,000,000,000.00	0.00
1.3.9	Dana Transfer Tunjangan Guru	0	0.00	0	
1.3.10	Dana Alokasi Desa Dari Pemerintah	155,258,138,000.00	310.516.276.000,00	155.258.138.000,00	100,00
1.3.14	Dana Pengembangan Sanitasi / EIG (UNICEF)	0	0.00	0	
1.3.15	Dana Insentif Daerah	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00	0.00	100.00
	Jumlah Pendapatan	1,639,840,143,342.50	2.110.053.120.420,50	470.212.977.078,00	28,67
2.	BELANJA DAERAH				
2.1	Belanja Tidak Langsung	1,032,043,601,963.95	1.252.980.705.410,55	220.937.103446,60	21,41
2.1.1	Belanja Pegawai	750,965,087,699.55	804.557.633.447,93	53.592.545.748,38	7,14
2.1.2	Belanja Bunga	0	0.00	0	
2.1.3	Belanja Subsidi	0	0.00	0	
2.1.4	Belanja Hibah	21,033,664,000.00	21.664.673.920,00	631.009.920,00	3,00

Nomor Urut	Uraian	APBD 2017	Proyeksi KUA PPAS 2018	SELISIH Antara APBD 2017 - KUA PPAS 2018	%
1	2	3	4	5	6
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1,468,000,000.00	1,468,000,000.00	0.00	0.00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	3,309,677,064.40	3.475.069.042,62	165.391.978,22	5.00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	252,267,173,200.00	416.815.329.000,00	164.548.155.800,00	65,23
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2.000.000.000,00	66,67
2.2	Belanja Langsung	629,891,296,584.00	853.612.415.009,95	223.721.118.425,95	35,52
2.2.1	Belanja Pegawai	91,802,811,500.00			0.00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	268,802,530,290.00			0.00
2.2.3	Belanja Modal	269,285,954,794.00			0.00
	Jumlah Belanja	1,661,934,898,547.95	2.106.593.120.420,50	444.658.221.872,55	26,76
	Surplus/ Defisit	-22,094,755,205.45	3.460.000.000,00	25.554.755.205,45	(115,66)
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	Penerimaan Pembiayaan				
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	29,054,755,205.45	3.500.000.000,00	-25.554.755.205,45	(87,95)
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0.00	0	
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0	0.00	0	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0.00	0	
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	940,000,000.00	940000,000.00	0,00	0.00
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	29,994,755,205.45	4.440.000.000,00	-25.554.755.205,45	(85,20)
6.2	Pengeluaran Pembiayaan				
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0.00	0	
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6,900,000,000.00	6,900,000,000.00	0.00	0.00
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang (Askes)	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0,00	0.00
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0.00	0	
6.2.5	Dana Bergulir Koperasi	0	0,00	0.00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	7,900,000,000.00	7,900,000,000.00	0.00	0.00
	Pembiayaan Neto	22,094,755,205.45	-3.460.000.000,00	-25.554.755.205,45	(115,66)

Nomor Urut	Uraian	APBD 2017	Proyeksi KUA PPAS 2018	SELISIH Antara APBD 2017 - KUA PPAS 2018	%
1	2	3	4	5	6
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA-TB)	0	0.00	0	

LAMPIRAN 2.

RENCANA ANGGARAN BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2018

KODE REKENING	NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	APBD 2017	PROYEKSI TAHUN 2018
1	2	3	4	5
	I	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	403,879,734,084.00	578,231,097,805.45
		PENDIDIKAN	32,593,432,500.00	45,630,805,500.00
1	01	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	32,593,432,500.00	45,630,805,500.00
		KESEHATAN	163,256,400,599.00	216,475,940,778.00
		DINAS KESEHATAN	84,852,400,000.00	114,550,740,000.00
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	78,404,000,599.00	101,925,200,778.70
		PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG	151,570,950,985.00	256,834,454,767.75
1	03	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	151,570,950,985.00	256,834,454,767.75
		PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	53,754,550,000.00	77,944,097,500.00
1	04	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN KAWASAN PEMUKIMAN	53,754,550,000.00	77,944,097,500.00
		SOSIAL	2,704,400,000.00	3,245,280,000.00
1	06	DINAS SOSIAL	2,704,400,000.00	3,245,280,000.00
		URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	35,694,541,250.00	44,129,632,162.50
		TENAGA KERJA	3,254,300,000.00	4,067,875,000.00
2	01	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3,254,300,000.00	4,067,875,000.00
		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1,089,901,209.00	1,362,376,511.25
2	02	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1,089,901,209.00	1,362,376,511.25

KODE REKENING		NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	APBD 2017	PROYEKSI TAHUN 2018
1		2	3	4	5
2	03		PANGAN	750,000,000.00	937,500,000.00
2	03	3	01 DINAS KETAHANAN PANGAN	750,000,000.00	937,500,000.00
2	05		PERTANAHAN	-	10.200.000.000.00
2	05	2	01 SEKRETARIAT DAERAH		
2	05		LINGKUNGAN HIDUP	3,455,800,00.00	4,319,750,000.00
2	05	2	01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3,455,800,00.00	4,319,750,000.00
2	06		ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	2,979,949,000.00	3,742,936,250.00
2	06	2	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	2,979,949,000.00	3,742,936,250.00
2	07		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5,250,400,000.00	6,563,000,000.00
2	07	2	22 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5,250,400,000.00	6,563,000,000.00
			PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4,252,538,791.00	5,315,000,000.00
2	02	2	12 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA BERENCANA	4,252,538,791.00	5,315,000,000.00
2	09		PERHUBUNGAN	2,517,413,250.00	4,146,766,562.50
2	09	2	01 DINAS PERHUBUNGAN	2,517,413,250.00	4,146,766,562.50
2	10		KOMUNIKASI DAN INFORMASI	1,690,000,000.00	2,028,000,000.00
2	10	2	25 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	1,690,000,000.00	2,028,000,000.00
2	11		KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2,698,351,000.00	3,372,938,750.00
2	11	2	01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2,698,351,000.00	3,372,938,750.00
2	12		PENANAMAN MODAL	2,486,888,000.00	2,984,265,600.00
2	12	2	16 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2,486,888,000.00	2,700,000,000.00
			KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2,210,000,000.00	2,541,500,000.00
1	01	1	01 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	2,210,000,000.00	2,541,500,000.00

KODE REKENING			NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	APBD 2017	PROYEKSI TAHUN 2018
1			2	3	4	5
2	14			STATISTIK	115,000,000.00	138,000,000.00
2	14	2		DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA DAN STATISTIK	115,000,000.00	138,000,000.00
2	15			PERSANDIAN	55,000,000.00	66,000,000.00
2	14	2		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	55,000,000.00	66,000,000.00
1	01			KEBUDAYAAN	785,000,000.00	850,000,000.00
1	01	1	17	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	785,000,000.00	850,000,000.00
2	17			PERPUSTAKAAN	1,885,000,000.00	2,356,250,000.00
2	17	2	25	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	1,885,000,000.00	2,356,250,000.00
3				URUSAN PILIHAN	62,857,544,000.00	83,115,228,475.00
3	01			KELAUTAN DAN PERIKANAN	11,937,000,000.00	16,114,950,000.00
3	01	3		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	11,937,000,000.00	16,114,950,000.00
3	03			PARIWISATA	4,943,600,000.00	6,426,680,000.00
3	02	3		DINAS PARIWISATA	4,943,600,000.00	8,426,680,000.00
3	03			PERTANIAN	39,274,433,000.00	52,426,619,900.00
3	03	3		DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	29,937,400.00	42,415,490,000.00
3	03	3	01	DINAS PETERNEKAN DAN KESEHATAN HEWAN	6,796,773,000.00	8,835,804,900.00
3	03	3		DINAS KETAHANAN PANGAN	2,540,260,000.00	3,175,325,000.00
3	06			PERDAGANGAN	902,907,500.00	1,128,634,375.00
3	06	3	06	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	902,907,500.00	1,128,634,375.00
3	08			PERINDUSTRIAN	4,623,203,500.00	5,547,844,200.00
3	07	3	06	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	4,623,203,500.00	5,547,844,200.00
0	08			TRANSMIGRASI	1,176,400,000.00	3,470,500,000.00
3	08	2	08	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1,176,400,000.00	3,470,500,000.00
4				URUSAN PEMERINTAHAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	127,459,477,250.00	129,503,658,024.00
4	01	4		PENGAWASAN	4,611,800,000.00	5,500,000,000.00
4	01	4	01	INSPEKTORAT	4,611,800,000.00	5,500,000,000.00
4	03			PERENCANAAN	8,136,000,000.00	9,000,000,000.00
4	03	4	01	BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	8,136,000,000.00	9,000,000,000.00
4	01	4		KEUANGAN	10,601,260,000.00	13,251,575,000.00
4	01	4	05	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANAGAN DAN ASET DAERAH	10,601,260,000.00	12,000,000,000.00
4	05			KEPEGAWAIAN	7,368,400,000.00	7,000,000,000.00

KODE REKENING			NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	APBD 2017	PROYEKSI TAHUN 2018
1			2	3	4	5
4	05	4		BADAN KEPEGWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN PELATIHAN	7,368,400,000.00	7,000,000,000.00
4	03			PENELITIAN DAN PENGEMBANAGAN	-	437.500.000.00
4	03	4	01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	437.500.000.00
4	01			PEMERINTAHAN UMUM	96,742,017,250.00	123,738,908,024.00
4	01	4	01	DPRD	-	0.00
4	01	4	02	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	-	0.00
4	01	4	03	SEKRETARIAT DAERAH	59,223,607,250.00	59,800,090,000.00
4	01	4	04	SEKRETARIAT DPRD	18,050,400,000.00	23,165,858,599.00
4	01	4	07	KECAMATAN	6,054,570,000.00	10,000,000,000.00
4	05			BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2,686,300,000.00	7,574,616,000.00
4	05			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	6,312,180,000.00	7,574,616,000.00
4	01	4	21	PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4,414,960,000.00	5,518,700,000.00
				JUMLAH	629,891,296,584.00	853,612,415,009.95

LAMPIRAN 3.

RENCANA ANGGARAN BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN TA 2018

KODE REKENING	NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PAGU KUA PPAS TAHUN 2018		
			BELANJA LANGSUNG (Rp)	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	TOTAL BELANJA (Rp)
1	2	3	5	6	7
	I	URUSAN WAJIB	592,182,122,915.54	1,164,216,842,695.72	1,756,398,965,611.26
1	01	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	32,735,832,500.00	595,839,266,034.82	628,575,098,534.82
		PENDIDIKAN	30,535,832,500.00	595,839,266,034.82	626,375,098,534.82
		PEMUDA DAN OLAHRAGA	1,200,000,000.00	0.00	1,200,000,000.00
		KEBUDAYAAN	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00
1	02	KESEHATAN	133,318,468,483.54	70,537,014,765.02	203,855,483,248.56
		DINAS KESEHATAN	66,980,923,326.54	45,333,469,299.86	112,314,392,626.40
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	66,337,545,157.00	25,203,545,465.16	91,541,090,622.16
1	03	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	82,115,450,985.00	15,256,847,423.43	97,372,298,408.43
		PEKERJAAN UMUM	79,645,450,985.00	15,256,847,423.43	94,902,298,408.43
		PENATAAN RUANG	2,470,000,000.00	0.00	2,470,000,000.00
1	04	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	75,929,250,000.00	0.00	75,929,250,000.00
		PERUMAHAN	75,929,250,000.00	0.00	75,929,250,000.00
1	06	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	11,547,000,000.00	5,617,692,375.68	17,164,692,375.68
		PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9,419,000,000.00	5,617,692,375.68	15,036,692,375.68
		PENATAAN RUANG	481,000,000.00	0.00	481,000,000.00

			STATISTIK	0.00	0.00	1,647,000,000.00
1	07		DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4,807,156,000.00	6,032,141,280.82	10,839,297,280.82
			PERHUBUNGAN	4,807,156,000.00	6,032,141,280.82	10,839,297,280.82
1	08		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	5,500,010,000.00	9,582,693,423.24	15,082,703,423.24
			LINGKUNGAN HIDUP	2,975,010,000.00	2,218,884,238.45	5,193,894,238.45
			KEHUTANAN	2,525,000,000.00	7,363,809,184.79	9,888,809,184.79
1	09		PERTANAHAN	7,550,000,000.00	0.00	7,550,000,000.00
			SEKRETARIAT DAERAH	7,550,000,000.00	0.00	7,550,000,000.00
1	10		KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	2,080,000,000.00	2,991,738,694.72	5,071,738,694.72
			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2,080,000,000.00	2,991,738,694.72	5,071,738,694.72
1	11		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4,405,357,000.00	8,484,727,148.34	12,890,084,148.34
			KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	2,801,860,000.00	8,484,727,148.34	11,286,587,148.34
			PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1,603,497,000.00	0.00	1,603,497,000.00
1	13		DINAS SOSIAL	2,055,000,000.00	3,368,782,653.19	5,423,782,653.19
			SOSIAL	2,055,000,000.00	3,368,782,653.19	5,423,782,653.19
1	14		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4,644,867,000.00	4,071,159,929.92	8,716,026,929.92
			TENAGA KERJA	3,857,367,000.00	4,071,159,929.92	7,928,526,929.92
			TRANSMIGRASI	787,500,000.00	0.00	787,500,000.00
1	15		KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	2,055,000,000.00	2,778,642,808.79	4,833,642,808.79
			DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	2,055,000,000.00	2,778,642,808.79	4,833,642,808.79
1	16		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	3,103,088,000.00	4,502,950,097.35	7,606,038,097.35
			PENANAMAN MODAL	1,388,088,000.00	1,512,204,833.06	2,900,292,833.06
			ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1,715,000,000.00	2,990,745,264.30	4,705,745,264.30
1	19		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	8,116,200,000.00	5,821,213,181.26	13,937,413,181.26
			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5,488,200,000.00	3,782,301,335.49	9,270,501,335.49
			BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2,628,000,000.00	2,038,911,845.76	4,666,911,845.76
1	20		OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	184,025,798,570.00	408,252,829,156.88	592,278,627,726.88

			DPRD	0.00	10,446,630,100.73	10,446,630,100.73
			KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	0.00	591,195,570.00	591,195,570.00
			SEKRETARIAT DAERAH	141,654,494,070.00	346,679,520,781.50	488,334,014,851.50
			SEKRETARIAT DPRD	17,565,500,000.00	5,098,881,121.56	22,664,381,121.56
			KECAMATAN	9,300,220,000.00	30,935,302,627.08	40,235,522,627.08
			INSPEKTORAT	4,080,000,000.00	5,607,359,525.31	9,687,359,525.31
			BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET	4,845,584,500.00	6,168,816,359.62	11,014,400,859.62
			BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT	6,580,000,000.00	2,725,123,071.08	9,305,123,071.08
1	21		KETAHANAN PANGAN	8,625,000,000.00	13,739,640,866.68	22,364,640,866.68
			DINAS KETAHANAN PANGAN	4,090,000,000.00	1,965,729,437.16	6,055,729,437.16
			BADAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	0.00	11,773,911,429.51	11,773,911,429.51
1	22		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6,126,915,000.00	3,401,750,248.24	9,528,665,248.24
			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6,126,915,000.00	3,401,750,248.24	9,528,665,248.24
1	24		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	5,595,156,000.00	0.00	5,595,156,000.00
1	24		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2,845,156,000.00	0.00	2,845,156,000.00
1	22		STATISTIK	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00
			PERSANDIAN	1,250,000,000.00		1,250,000,000.00
1	26		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	2,128,509,177.00	1,209,733,159.56	3,338,242,336.56
			PERPUSTAKAAN	1,738,509,177.00	1,209,733,159.56	2,948,242,336.56
			KEARSIPAN	390,000,000.00	0.00	390,000,000.00
1	27		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	11,900,064,200.00	2,728,019,447.79	14,628,083,647.79
			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	11,900,064,200.00	2,728,019,447.79	14,628,083,647.79
2		II	URUSAN PILIHAN	56,225,248,639.00	46,347,961,420.01	102,573,210,059.01
2	01		PERTANIAN	37,348,899,639.00	22,759,934,552.17	60,108,834,191.17
			DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	31,670,551,047.00	13,490,431,469.05	45,160,982,516.05
			DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	5,678,348,592.00	9,269,503,083.12	14,947,851,675.12
2	04		PARIWISATA	2,316,922,000.00	4,093,588,154.68	6,410,510,154.68
			DINAS PARIWISATA	2,316,922,000.00	4,093,588,154.68	6,410,510,154.68
2	05		KELAUTAN DAN PERIKANAN	12,052,553,000.00	5,435,615,865.10	17,488,168,865.10
			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	12,052,553,000.00	5,435,615,865.10	17,488,168,865.10

2	07		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	4,506,874,000.00	3,704,268,398.97	8,211,142,398.97
			PERDAGANGAN	1,971,369,500.00	3,704,268,398.97	5,675,637,898.97
			PERINDUSTRIAN	2,535,504,500.00	0.00	2,535,504,500.00
			JUMLAH (I + II)	648,407,371,554.54	1,210,564,804,115.73	1,858,972,175,670.27

Bima, Agustus 2017

BUPATI BIMA,



Hj. Indah Dhamayanti Putri